BAB IV

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

Salah satu kebijakan MEA 2015 adalah bentuk pasar tunggal dan basis produksi regional, hal ini tentu menjadi peluang dan tantangan bagi UKM di Indonesia tak terkecuali di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Cakupan wilayah pemasaran memang terbukti mempengaruhi laba suatu perusahaan seperti UKM di wilayah ini, akan tetapi jumlah UKM yang mampu menembus pasar Internasional masih dalam kategori rendah jika di akumulasikan dengan jumlah seluruh UKM yang ada di Indonesia.

Seperti halnya yang terjadi pada UKM bidang Industri Tas dan Koper di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Meskipun Sebagian besar pasar UKM bidang ini sudah mampu menembus pasar internasional atau ekspor, tapi tidak sedikit pula yang masih hanya memenuhi pasar lokal atau wilayah Kabupaten dan regional atau masih terbatas pada daerah – daerah tertentu, ini dikarenakan beberapa sebab terkait managemen dari masing masing pelaku usaha mikro (UMKM) yang perlu dibenahi, seperti *pertama*, masalah laporan keuangan yang kurang sistematis yang nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi. *Kedua*, pemberdayaan tenaga UKM yang masih kurang diperhatikan oleh atasan, dan *ketiga*, minimnya pengetahuan dari pengrajin UKM terhadap perkembangan teknologi. Namun selain dari itu, niat dan tekad yang kuat dari masing-masing pelaku UKM untuk memperjuangkan hasil usahanya ke kancah internasional juga menjadi penentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun disamping itu pemerintah setempat saat ini sedang gencar-gencarnya dalam menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota UKM sehingga para pelaku Usaha Kecil Menengah di perhatikan betul, ini dibuktikan bahwa setiap desa di Kabupaten Sidoarjo memiliki produk – produk unggulan, termasuk Kecamatan Tanggulangin yang terkenal dengan produksi kerajinan kulitnya. Harapannya kedepan, Sidoarjo sudah sangat siap dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang rencananya dimulai pada akhir tahun 2015 ini.

UKM di Indonesia selama ini digunakan sebagai instrumen kebijakan sosial atau kebijakan untuk mengurangi pengangguran dan atau kemiskinan[1]. Dengan demikian UKM tidak dilihat sebagai kelompok bisnis murni. Agar UKM dapat maju dan berkembang maka kelompok usaha ini harus di pandang dan di tanggapi sebagai kelompok bisnis murni. Artinya UKM dapat tumbuh dan berkembang harus sepenuhnya dikarenakan kreativitas atau inovasi dari pengusaha/pemilik, bukan karena di dorong – dorong atau "dipaksa" hidup oleh berbagai program atau skim-skim kredit atau bantuan khusus dari pemerintah. Ini artinya jika sebuah UKM mati dikarenakan kalah bersaing, maka pemerintah tidak perlu memaksakan untuk menghidupkan kembali. Dalam bisnis hal tersebut adalah hal yang biasa, ada yang mati, berkembang, dan bahkan merosot.

Implikasi dari perubahan paradigma dari orientasi sosial ke orientasi pasar dan daya saing adalah bahwa kebijakan UKM harus menekankan sejumlah prinsip dasar, diantaranya sebagai berikut: (1) Bisnis adalah tetap bisnis, jika seseorang

[1] Tambunan, T.T.H., *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka UKM sendiri namun terpaksa tutup karena kalah bersaing, tidak perlu dibantu untuk dihidupkan kembali. Pada dasarnya UKM jangan di paksa bertahan jika memang barangnya tidak lagi disukai oleh konsumen. (2) Hanya UKM yang memiliki potensi pasar karena punya keunggulan komparatif dan kompetitif yang perlu dibantu oleh pemerintah, jadi prinsip yang berlaku adalah *"picking the winners"*. (3) Fokus bantuan yang diberikan kepada UKM harus pada pengembangan teknologi dan inovasi. (4) Pemberian kredit bagi UKM tidak merupakan komponen yang paling penting. Pengalaman menunjukkan UKM yang mulai atau berkembang dengan sendirinya akan didatangi oleh perbankan. (5) Bantuan pada UKM tidak bersifat protektif, dalam konteks ini sejalan dengan prinsip yang bisa maju adalah UKM yang mampu bersaing bebas dalam kondisi pasar non-diskriminasi.

A. Strategi UKM Tas Dan Koper Awany dan Tri Jaya dalam menghadapi MEA

Belum kuatnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Pemberdayaan UKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menambah nilai jual UKM itu sendiri, terutamanya agar dapat bersaing dengan produk – produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Menurut laporan salah satu lembaga non profit, *World Economic Forum* (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia, pada tahun 2010 menempatkan pasar Indonesia pada rangking ke-15[2]. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UKM secara maksimal. Perkembangan UKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebakan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya pajak yang ditanggung pemilik. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global, namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tak kunjung terselesaikan seperti masalah gaji karyawan yang mengikuti Upah Minimum Rakyat (UMR), ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Permasalahan lain yang dihadapi UKM, yaitu adanya liberalisasi perdagangan, seperti pemberlakuan *Asean China Free Trade Area (ACFTA)* yang

[2] Ragimun Sudaryanto, *Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 2011), h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara efektif telah berlaku tahun 2010. Di sisi lain, pemerintah telah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA ataupun perjanjian lainnya termasuk perjanjian Pasar Bebas Asean atau *Asean Free Trade Area* (AFTA), tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu kesiapan UKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga untuk memposisikan persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UKM Indonesia pada saat diberlakukannya *Asean Community* yang direncanakan tahun 2015.[3]

Kemampuan UKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri.

Strategi pengembangan UKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai mampu bertahan menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT). Sebagai mana yang dilakukan oleh UKM Awany dan UKM Tri Jaya yang merupakan dua dari sekian banyak UKM yang ada di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, kedua UKM ini, meski mempunyai latar belakang yang berbeda namun keduanya sudah bisa dikatakan mampu dalam menghadapi terpaan arus global serta Krisis Moneter

[3] Ragimun Sudaryanto, *Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 2011), h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi pada tahun 1999, belum lagi bencana Lumpur Lapindo tahun 2006 yang membuat banyak UKM yang ada di sekitarnya gulung tikar.

Langkah yang diambil oleh kedua UKM ini adalah pemilik usaha untuk segera mematenkan produk yang asli dibuat dan di desain langsung dengan sertifikasi pendaftaran perizinan edar dan pemasaran serta label-label yang digunakan pada produk tas, koper, sepatu dan standar mutu yang lain demi untuk menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini demi meningkatkan kualitas produk dan mematenkan dengan standar mutu agar produk yang dihasilkan semakin berdaya saing. Selain itu, dengan membuat produk yang berkualitas serta harga sesuai dengan kualitas, pasti produk akan lebih bersaing dengan produk dari negara ASEAN lainnya.

Strategi UKM Awany,[4] sebagaimana yang telah di paparkan pada Bab terdahulu, merupakan salah satu pemilik usaha Tas dan Koper di Tanggulangin Sidoarjo, yang telah mendaftarkan dan mematenkan barang yang akan dipasarkan ke berbagai pengkulak, salah satunya yang dikirim ke Yogyakarta dan Bali. Pada awal membuka usaha Bapak Suwadi mengalami pasang surut dalam memasarkan hasil karyanya. Hingga pada akhirnya pemilik usaha Awany ini mengaku bahwa untuk mempertahankan usaha yang digelutinya sejak tahun 1993 adalah dengan cara menerima desain langsung dari pengkulaknya, sehingga model tas dan koper jarang menggunakan model desain miliknya, namun dari permintaan pasar. Tas dan koper yang di desain langsung olehnya terkadang hanya bisa dititipkan di koperasi INTAKO saja, salah satu koperasi di Tanggulangin yang menaungi

[4] Bapak Suwadi, *Wawancara*, Tanggulangin, 11-Agustus-2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang hasil kerajinan dari para pemilik UKM dalam bidang Tas dan Koper khususnya, namun barang yang dititipkan tersebut tidak selalu mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai target, hal ini juga dikarenakan pihak UKM Awany harus berbagi untung dengan pihak INTAKO tersebut.

Adapun UKM Tri Jaya, dalam hal pemasaran, UKM ini memang tidak menitipkan barang kepada Koperasi INTAKO,[5] usaha yang dimiliki oleh Bapak Sunyoto ini dalam hal penitipan produk dinilai tidak cocok , karena nanti akan ada bagi hasil atau pajak kepada INTAKO. Namun bapak Sunyoto memiliki *showroom* sendiri sehingga konsumen bisa langsung melihat dan memilih barang hasil produksi dari UKM Tri Jaya dengan langsung mendatangi *showroom*nya.

Ada kebijakan mengenai penitipan di koperasi INTAKO, anggota koperasi bisa memilih salah satu dari kebijakan tersebut. Yang pertama model penitipan, yang dimana pengrajin bisa menitipkan barang yang ingin dijualnya seharga 50 juta lebih, tetapi hasilnya tidak dapat langsung diambil, melainkan menunggu barang tersebut laku. Opsi yang kedua, pengrajin hanya dibatasi menjual barang senilai 3 juta rupiah saja. Opsi kedua ini bisa diambil langsung uangnya untuk bermodal kembali. Kebijakan seperti ini terkesan hanya memihak kepada pemilik modal usaha besar. Karena mereka bisa menitipkan barang sebanyaknya dan bisa memulai produksi lagi dengan modal yang dimilikinya. Sedangkan mereka yang memiliki modal sedikit akan sulit untuk berkembang dengan cepat.

[5] Sunyoto, *Wawancara*, Tanggulangin, 13-September-2015. Pukul 13.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi ini seperti yang diutarakan oleh Gramsci[6] terhadap hegemoni memberikan peran yang sangat penting dan besar kepada kelompok intelektual tertentu yang disebut sebagai intelektual organik. Yang dimaksud dengan intelektual organik adalah kaum – kaum intelektual yang menjadi penentu kebijakan suatu negara dalam meneguhkan hegemonitasnya.

Dalam hal ini intelektual bukan hanya aktivitas berpikir saja seperti pemikir tetapi intelektual mencakup ke semua hal yang mencakup suatu keahlian tertentu. Gramsci berpendapat bahwa intelektual organik sangat berperan sekali dalam suatu negara dalam meneguhkan hegemoni. Mereka adalah kelompok intelektual yang terkait dengan kelompok dominan yang berfungsi untuk melegitimasi dan memperkuat pola hubungan kekuasaan tersebut. Dalam artian kekuasaan menjadi milik mereka yang memiliki modal besar.

B. Upaya Pemerintah Sidoarjo meningkatkan daya saing hadapi MEA

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang memiliki usaha kecil menengah terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2014, jumlah total Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sidoarjo, mencapai 171.569 unit usaha. Rinciannya, usaha mikro 155.415 unit, usaha kecil menengah 154 unit, dan untuk usaha besar 16.000 unit. Dengan jumlah unit usaha yang demikian banyak, bisa diperkirakan betapa banyaknya tenaga kerja yang terserap disana[7].

Tidak akan mungkin kerja rakyat dan usaha rakyat tersebut bisa tumbuh demikian pesat, bila tidak didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang

[6] Mark Ruppert, *Teori-Teori Kritis, menantang pandangan utama studi politik internasional*, Yogyakarta, 2010, hal 242

[7] Cucuk Susilaningsih, *Wawancara*, Disperindag Sidoarjo, Tanggal 1 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondusif. Dan tidak akan mungkin tingkat partisipasi rakyat sampai sedemikian tinggi, bila tidak disertai oleh interaksi yang positif antara seluruh elemen di kabupaten tersebut. Jenis usaha yang dilakukan masyarakat Sidoarjo, sesungguhnya adalah jenis aktivitas ekonomi yang juga ada di tempat lain. Misalnya, usaha jajanan, konveksi, tas dan koper, batik, bebek, kerupuk, pot, jamur, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kabupaten Sidoarjo termasuk pada golongan daerah yang sangat siap dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 ini. Namun untuk tingkat nasioanal secara keseluruhan, tetap serahkan kepada pemerintah pusat. Dalam hal kesiapannya menghadapi MEA 2015, setiap bulannya pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Disperindag) mengadakan pembekalan dalam bentuk *training* atau pelatihan mengenai masalah produksi, pengemasan sampai pemasaran kepada para pelaku usaha di daerahnya. Seperti yang diungkapkan Ibu Cucuk Susilaningsih selaku Kepala Seksi pembinaan dan pemasaran;

> "Kami dari pihak Dinas UKM mulai mengadakan pembekalan melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan mengenai masalah produksi, pengemasan, pemasaran kepada UKM. Dari situ kami berharap pengrajin UKM sadar dengan kriteria-kriteria dalam menghadapi MEA 2015. Pembekalan untuk menghadapi MEA 2015 itu sudah dari tahun 2009. Pembekalan disini terkadang menggunakan computer agar para pelaku UKM lebih mudah mengakses kemajuan desain-desain dan kiat-kiat produksi dari internet. Dari mulai membekali pelaku UKM membuat tas, koper, sepatu, dan jaket yang berkualitas, sampai dengan mengajak serta pelaku UKM mengikuti pameran-pameran yang dilaksanakan di Surabaya, Sidoarjo, bahkan ke NTB juga, kalau yang ke NTB itu rencananya bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

depan tanggal 20-23 Agustus 2015. Pameran Produk Unggulan, Koperasi, UKM, dan PKBL 2015"[8].

Selain itu, Pemerintah Sidoarjo juga menerapkan program Desa Melangkah, kegiatan ini melibatkan seluruh Kepala Desa se Sidoarjo dengan mengadakan suatu seminar atau pelatihan kepada seluruh Kepala Desa dengan tujuan agar edukasi semacam ini bisa diterapkan oleh kepala desa kepada masyarakat setempat dalam menjalankan usaha yang mereka geluti.

Dari pernyataan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah sangat mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA 2015. Namun meski begitu, gebarakan-gebrakan baru harus tetap di rencanakan demi menjaga eksistensi keberlangsungan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat di daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam memanagemen dan mengelola para pelaku UKM pemerintah menerapkan hal yang sama dengan apa yang dijelaskan pada teori *neoliberalisme* yang menolak campur tangan negara dalam hal ini pemerintah, dalam urusan ekonomi, karena dikhawatirkan, jika ada campur tangan negara, pada akhirnya akan mendistorsi atau memutarbalikkan fakta pasar dan membuatnya tidak efisien dan tidak sesuai kenyataan. Karenanya, liberalisasi dan privatisasi menjadi ciri penting dalam kebijakan neoliberalisme pada tingkat domestik.[9]

Dalam konsep *Free Trade* nantinya barang dan jasa akan di perdagangkan secara bebas di antara negara – negara anggotanya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing dengan Negara ASEAN lainnya pemerintah

[8] Cucuk Susilaningsih, *Wawancara*, Disperindag Sidoarjo, Tanggal 1 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB
[9] Apridar, *Ibid*, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghimbau agar UKM berkenan mendaftarkan dan mematenkan merek usahanya, ini di karenakan pasar internasional (*free trade*) tidak akan menerima jika barang yang bersangkutan tidak memiliki ijin edar.

Dalam perjanjian *Free Trade*, setiap partisipan akan berjuang untuk meraup keuntungan dengan mengkhususkan diri pada produksi barang dan jasa yang mana barang tersebut memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor barang dan jasa terhadap negara yang memiliki kelemahan komparatif. Dengan adanya perjanjian *Free Trade*, diharapkan kepada para pengrajin UKM Tas dan Koper untuk bisa memproduksi Tas dan koper yang memiliki keunggulan komperatif agar mampu bersaing dalam MEA 2015 yang didalamnya hambatan – hambatan (seperti tarif dan kuota) di antara negara – negara anggotanya di hapuskan. Namun tetap memberlakukan hambatan berdagangan terhadap negara yang bukan anggota Asean.

Optimisme pemerintah akan kesiapan perekonomian di Sidoarjo ini dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, mempengaruhi minimnya upaya penyiapan perekonomian Indonesia secara lebih matang dalam sektor-sektor yang sangat penting. Keyakinan pemerintah Sidoarjo akan ideologi neoliberalisme mencerminkan eksistensi hegemoni yang melahirkan praktik-praktik kebijakan yang bertumpu pada peranan pasar, sehingga pemerintah tidak merasa perlu memainkan peranan yang strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asumsi melalui liberalisasi daya saing ekonomi akan berkembang dengan sendirinya melalui mekanisme pasar yang bekerja tanpa terlihat.[10]

Dalam langkah untuk meningkatkan daya saing UKM di Indonesia ada hal penting yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Sidoarjo. Tugas pemerintah yang di maksud kan adalah:

a. Menghilangkan hambatan yang bersifat artifisial (tidak alami) terhadap pertumbuhan UKM, untuk itu kebijakan pemerintah harus bersifat netral terhadap semua jenis atau skala usaha.
b. Tidak ada salahnya pemerintah menerapkan kebijakan proteksi terhadap usaha-usaha skala kecil yang baru tumbuh, namun jangka waktunya harus jelas dan tidak lama serta kebijakan ini harus bersifat pembelajaran.

   Berkaitan dengan proses pembelajaran, pemerintah dapat membantu meningkatkan daya saing UKM melalui proses capacity building.

Hal ini terkait dengan penentu daya saing dari perusahaan adalah perusahaan itu sendiri dan pelaku kuncinya adalah pengusaha dan pekerja. Di dalam UKM pengusaha atau pemilik merupakan penggerak utama perusahaan. Dalam hal ini kreativitas, jiwa kewirausahaan, dan jiwa inovatif dari pengusaha yang didukung oleh keahlian atau ketrampilan para pekerja adalah sumber utama peningkatan daya saing UKM. Agar pengusaha dan pekerja UKM dapat berperan dengan optimal, paling tidak ada 5 prasyarat utama yaitu mereka sepenuhnya memiliki : (1) pendidikan, (2) modal, (3) teknologi, (4) informasi, dan (5) input krusial lainnya.

---

[10] Richard Peet, *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO 1st Edition,* (London: Zed Books, 2003), h.18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemenuhan kelima prasyarat utama tersebut sifatnya harus dinamis, dalam arti harus mengikuti: (1) perubahan pasar (selera konsumen dan tekanan persaingan), (2) perubahan ekonomi nasional dan global, (3) kemajuan teknologi, dan (4) penemuan-penemuan material baru untuk produksi. Bukan hal yang mudah bagi UKM untuk memenuhi kelima prasyarat tersebut. Harus digarisbawahi bahwa pemenuhan kelima prasyarat utama tersebut adalah tanggungjawab sepenuhnya UKM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id